

DAFTAR PUSTAKA

- Amrah Muslimin, 1986, Aspek-aspek Otonomi Daerah, Alumni, Bandung
- Anton Muliono, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
- Bagir Manan, 1992, Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia, IND-HILL.CO, Jakarta Yogyakarta
- , Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945
- , 2001., "Menyongsong Fajar Otonomi daerah" , PSH FH UII,
- , 2004." Politik Kontitusi" cetakan kedua, FH UII Press, Yogyakarta.
- Burhanuddin, 1995, Studi Tentang Retribusi Daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah di Kotamadya Ujung Pandang, Tesis S-2 Program Study Administrasi Pembangunan UNHAS, Ujung Pandang.
- Fatmawati, 2005, Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gunawan Kusmito, 2007, Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Kekuasaan Pemerintahan dalam Membatalkan Peraturan Daerah ditinjau dari Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia, Harun Alrasid, 2003, Masalah Judicial Review (Makalah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat tentang Judicial Review), Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, Tesis Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Harun Alrasid, 2003, Masalah Judicial Review (Makalah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat tentang Judicial Review), Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta.

- Irawan Soejito, 1981, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Irawan Soejito, 1983, "Pengawasan Terhadap Peraturan daerah dan Kepala daerah", Bina Akasara, Jakarta.
-, 1983, "Hubungan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah", Bina Akasar, Jakarta. Daerah, Bina Aksara, Jakarta.
- I Gde Pantja Astawa, 2008, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, Alumni, Bandung,
- Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Konstitusi Press, Jakarta.
- , Menelaah Putusan Mahkamah Agung tentang judicial review atas PP No. 19/2000 yang bertentangan dengan UU No. 31 Tahun 1999.
- , 2005, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Yayasan Watampone, Jakarta
- , 2006, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jazim Hamidi, 2008 Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.
- M.Kamal Hidjaz, 2007, "efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam sistem Pemerintahan Daerah di Sulawesi Selatan", Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Maria Farida Indriati, 1996, Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya (Bagian Pertama dari Ilmu Perundang-undangan), UI, Jakarta.

- Maswardi Rauf, 1998, Demokrasi dan Demokratisasi; Penjajakan Teoritis untuk Indonesia Dalam Menimbang Masa Depan Orde Baru, Mizan, Bandung.
- Muhammad Alim Abadi, 2009., Tinjauan Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah (Study Kasus Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Usaha Perikanan dan Hasil Tangkapan Ikan), Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNHAS, Makassar. Muchlis Hamdi, 2001, Filosofi Otonomi Daerah, Makalah, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2007, Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, FH UII Press, Yogyakarta
- , 2010, Problematika Pembatalan Peraturan daerah, FH UII Press, Jakarta
- Philipus M. Hadjon dkk., 2005, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- S.H Sarundajang, 2003. "Birokrasi Dalam Otonomi Daerah", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sadjiyono, 2008, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sadjiyono, 2008, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Lakbang Pressindo, Yogyakarta.
- Teguh Yuwono, 2001, Manajemen Otonomi Daerah, GAPPS Diponegoro University, Semarang.
- Widarta, 2001, Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan